

**IMPLEMENTASI DAN EVALUASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
ROKAN HULU TERHADAP PENYUSUNAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA (RKPDes) DI DESA
KEPENUHAN HULU**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum*



Oleh

**CHARLEN
NIM. 2035516**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN
FAKULTAS HUKUM
2024**

HALAMAN PENGESAHAN

**IMPLEMENTASI DAN EVALUASI PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU TERHADAP PENYUSUNAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDes)
DI DESA KEPENUHAN HULU**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Penyusun

CHARLEN
NIM. 2035516

PEMBIMBING I


Zulkifli, SH, MH, C.L.A
NIDN. 1005117701

PEMBIMBING II


Almadison, SH., MH., CPLC., CPCLE
NIDN. 103118101

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN
FAKULTAS HUKUM**

2024

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim Penguji pada hari tanggal

Tim Penguji Skripsi:

Ketua : Zulkifli, SH., MH., C.L.A

Sekretaris : Almadison, SH, MH., CPLC., CPLCE

Anggota 1 : Dr. H. Nofrizal, Lc., MH

Anggota 2 : Rise Karmilia, SH., MH., Ph. D

Anggota 3 : Risky Anlafater, SH., M. Kn

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Pasir Pengaraian

Rise Karmilia, SH., MH., Ph. D
NIDN. 1004068502

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Nama : Charlen
NIM : 2035516
Bidang Minat : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Implementasi Dan Evaluasi Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan
Hulu Terhadap Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa
(RKPDDes) di Desa Kepenuhan Hulu

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan skripsi lain. Demikian pernyataan ini dibuat tanpa ada paksaan dari pihak manapun, apabila pernyuataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh pimpinan Fakultas.

Pasir pengaraian, 2024

Yang membuat pernyataan,




CHARLEN
NIM. 2035516

KATA PENGANTAR

Puji beserta syukur kepada Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan ridho-Nya, penulis dapat menyelesaikan proposal penelitian ini dengan waktu yang telah ditentukan. Ada pun judul skripsi ini yaitu “Implementasi dan Evaluasi Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu Terhadap Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) di Desa Kepenuhan Hulu”. Penulis merasa bahagia berkat tercapainya penyelesaian tugas ini, namun dalam prosesnya penulis tidak sendiri, melainkan penulis juga didukung dan dimotivasi oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Hardianto, M. Pd. selaku Rektor Universitas Pasir Pengaraian yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Pasir Pengaraian.
2. Bapak Zulkifli, SH, MH, C.L.A selaku Wakil Rektor I Universitas Pasir Pengaraian dan sekaligus selaku pembimbing pertama yang memberi arahan dan bimbingan
3. Ibu Rise Karmilia, SH., M. Hum., Ph. D selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian
4. Bapak Almadison, SH., MH., CPLC., CPCLE selaku Kaprodi di Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian dan sekaligus pembimbing kedua memberi semangat dan masukan.
5. Seluruh Dosen dan Karyawan Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian, atas ilmu, bimbingan dan bantuannya sehingga penulis selesai menyusun tugas akhir ini
6. Untuk keluarga tercinta, Istri dan anak yang selalu mendoakan dan memberi semangat dalam proses ini
7. Untuk Alfa Syahputra, SM., MM selaku koordinator, serta untuk seluruh rekan-rekan mahasiswa yang memberi dukungan

Pasir Pengaraian,

2024

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI	iii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan Penelitian	12
1.4 Manfaat Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Teori Implementasi dan Evaluasi.....	13
2.2 Kebijakan Publik (<i>Public Policy</i>)	16
2.2.1 Definisi Kebijakan Publik.....	16
2.2.2 Fungsi Kebijakan Publik.....	18
2.2.3 Jenis-Jenis Kebijakan Publik	21
2.2.4 Etika Kebijakan Publik	23
2.3 Konsep Pemerintahan.....	24
2.4 Pemerintahan Daerah	26
2.4.1 Definisi Pemerintahan Daerah	26
2.4.2 Kebijakan Pemerintahan Daerah.....	27

2.5 Pemerintahan Desa.....	30
2.5.1 Definisi Pemerintah Desa.....	30
2.5.2 Otonomi Desa	33
2.5.3 Bentuk Kebijakan Pemerintah Desa	34
2.6 Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes)	35
2.7 Konsep Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes)	40
BAB III METODE PENELITIAN	44
3.1 Jenis penelitian.....	44
3.2 Lokasi Penelitian.....	44
3.3 Populasi dan Sampel Penelitian	45
3.1 Populasi.....	45
3.2 Sampel.....	45
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	46
3.5 Teknik Analisa Data.....	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	51
4.1 Implementasi Kesesuaian Usulan Masyarakat dengan Penerapan Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa	51
4.1.1 Peraturan Perundang-Undangan Terkait Penerapan dan Penggunaan Dana Desa.....	51
4.1.2 Pelaksanaan Musyawarah Desa dalam Menampung Usulan Masyarakat	55
4.1.3 Kesesuaian Aturan Usulan Masyarakat dalam Penerapan dan Penggunaan Dana Desa dengan Peraturan Perundang-Undangan	65
4.2 Evaluasi Penerapan RKP Pemerintah Desa Kepenuhan Hulu dalam Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa pada Tahun 2022.....	71
4.2.1 Peraturan Perundang-Undangan Terkait Evaluasi Penerapan RKPDDes	74

4.2.2 Penerapan RKPDes Berbagai Desa di Indonesia.....	75
4.2.3 Evaluasi Implementasi RKPDes di Desa Kepenuhan Hulu.....	78
BAB V PENUTUP	95
5.1 Kesimpulan	95
5.2 Saran.....	95

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Populasi Sampel Penelitian.....	46
Tabel 4.1 Daftar Usulan RKPDes Tahun 2022	58
Tabel 4.2 Pembagian Dana Desa	66
Tabel 4.3 RKP yang Sudah Diimplementasikan.....	67

ABSTRAK

Latar belakang dari penelitian ini karena permasalahan mengenai usulan masyarakat desa Kepenuhan Hulu melalui RKPDDes masih ada yang belum dapat direalisasikan melalui APBDes, terutama yang bersumber dari dana desa akibat ada ketentuan pemerintah pusat bahwa prioritas penggunaan dana desa harus mengarah ke pembangunan nasional yang bersifat ekonomis. Akibatnya beberapa aspirasi masyarakat yang bersifat non-ekonomis dan sudah masuk dalam RKP tidak dapat diimplementasikan. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana implementasi kesesuaian usulan masyarakat dengan penerapan penggunaan dan pengelolaan dana desa Kepenuhan Hulu dan Bagaimana evaluasi penerapan RKPDDes tersebut. Ada pun jenis penelitian ini adalah yuridis-empiris, metode yang digunakan yaitu wawancara, dengan pendekatan analisis deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian ini adalah (1) Implementasi Kesesuaian Usulan Masyarakat dengan Penerapan Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa Kepenuhan Hulu tidak terlaksana dengan optimal karena ada beberapa usulan masyarakat belum dapat direalisasikan karena tidak terkategori dalam prioritas pembangunan nasional. Dana desa yang telah dianggarkan dalam APBDes dialokasikan dan dikelola sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dievaluasi secara berkala oleh pemerintah daerah dan lainnya

Kata Kunci: RKPDDes, Dana Desa, Prioritas

ABSTRACT

The background of this research is due to the issues regarding the proposals of Kepenuhan Hulu village community through RKPDes that have not been fully realized through APBDes, especially those funded by village funds because of a central government regulation that prioritizes the use of village funds towards national development with an economic nature. As a result, several non-economic aspirations of the community that are included in the RKP cannot be implemented. The research problem in this study is how the implementation of community proposals aligns with the utilization and management of village funds in Kepenuhan Hulu and how the evaluation of RKPDes implementation is conducted. This study adopts a juridical-empirical approach, using interview as the method, with a descriptive-qualitative analysis approach. The findings of this research are: (1) The implementation of the alignment between community proposals and the utilization and management of village funds in Kepenuhan Hulu is not optimally executed because some community proposals cannot be realized due to not being categorized within national development priorities. Village funds allocated in the APBDes are disbursed and managed according to applicable regulations and are periodically evaluated by local government and others.

Keywords: *RKPDes, Village Funds, Priorities*